



## Policy Brief

# Defisit Pembiayaan JKN-KIS: Ancaman dan Peluang untuk Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Dara Puspita, Rahayu Titis, Mefi Raviqa, Dewa Ngakan Gde Wahyu Mahatma Putra

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Program JKN-KIS merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *Universal Health Coverage*. Selama tahun 2018-2020, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Namun di tahun 2021, BPJS Kesehatan berhasil mendapatkan laba bersih 38,76 Triliun Rupiah dengan penguatan kendali mutu kendali biaya dan karena penurunan jumlah masyarakat yang berobat ke rumah sakit selama pandemi Covid-19. Di masa pasca-pandemi, bukan tidak mungkin BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit jika tidak ada kebijakan yang berkelanjutan seperti; keterbukaan informasi dan kemudahan pembayaran iuran dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan fungsi FKTP melalui layanan promotive-preventif.

## TARGET POLICY BRIEF

- ◆ BPJS Kesehatan
- ◆ Kementerian Kesehatan
- ◆ Kementerian Keuangan

## PERNYATAAN MASALAH

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC)<sup>(1)</sup>. Implementasi JKN dengan nama program Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Indonesia sejak 2014 telah memberikan manfaat kepada masyarakat, terlihat dari meningkatnya kepesertaan dan penggunaan program yang saat ini telah mencapai 241,7 juta jiwa per tanggal 30 Juni 2022<sup>(2)</sup>. Program JKN-KIS saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Program JKN-KIS juga memberikan dampak langsung yaitu pengurangan beban biaya yang ditanggung peserta ketika mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan di Indonesia. Meskipun jumlah kepesertaannya tinggi, namun BPJS Kesehatan sebagai pengelola program JKN-KIS pernah mengalami defisit pembiayaan sebesar 7,95 Triliun Rupiah pada tahun 2018<sup>(3)</sup>, defisit 51 Triliun Rupiah pada tahun 2019, dan defisit sebesar 5,69 Triliun Rupiah pada

- (1). Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan. Pemerintah upayakan Universal Health Coverage bagi Masyarakat Indonesia – Sehat Negeriku [Internet]. 2021 [cited 2022 Aug 31]. Available from: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201212/0135971/pemerintah-upayakan-universal-health-coverage-bagi-masyarakat-indonesia/>
- (2). Humas BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Mendengar 2022 Jaring Masukan tentang Pengelolaan JKN ke Depan [Internet]. 2022 [cited 2022 Aug 31]. Available from: <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2360/BPJS-Kesehatan-Mendengar-2022-Jaring-Masukan-tentang-Pengelolaan-JKN-ke-Depan>
- (3). Katadata. Akhir September 2018, BPJS Kesehatan Defisit Rp 7,95 Triliun [Internet]. 2018 [cited 2022 Aug 31]. Available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/31/akhir-september-2018-bpjs-kesehatan-defisit-rp-795-triliun>

tahun 2020<sup>(4)</sup> yang dapat mengancam keberlanjutan program. Defisit pembiayaan program JKN-KIS dapat memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung pada: 1) Turunnya kualitas layanan kesehatan, 2) Turunnya tingkat kepercayaan penyedia layanan kesehatan, dan 3) Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program JKN-KIS. Pada tanggal 1 Januari 2021, Pemerintah telah menaikkan iuran JKN-KIS pada semua kelas tetapi upaya ini masih belum dapat mengatasi persoalan defisit dengan optimal. Banyak pengguna JKN-KIS yang tidak setuju karena kenaikan tersebut dapat memberikan beban tambahan pada keuangan rumah tangga sehingga banyak yang memilih untuk menunggak pembayaran iuran JKN-KIS sampai dengan peserta perlu mendapatkan layanan kesehatan.

Pengelolaan anggaran JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di tahun 2021 telah mencapai hasil yang baik dengan keberhasilan memperoleh laba bersih sebesar 38,76 Triliun Rupiah<sup>(5)</sup>. Pencapaian ini diperoleh karena BPJS Kesehatan telah berhasil menerapkan penguatan sistem kendali mutu dan kendali biaya sehingga dapat mencegah adanya *fraud* dan disebabkan juga karena penurunan jumlah masyarakat yang berobat ke rumah sakit selama masa pandemi Covid-19<sup>(6)</sup>. Di masa depan, bukan tidak mungkin BPJS Kesehatan kembali

mengalami defisit jika terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang berobat ke rumah sakit pasca-pandemi. Sehingga, dibutuhkan tindakan dan kebijakan yang berkelanjutan untuk mencegah defisit pengelolaan anggaran JKN-KIS.

## FAKTOR PENYEBAB MASALAH

Defisit pada pembiayaan JKN-KIS salah satunya disebabkan karena tingginya beban pembiayaan kesehatan kuratif (pengobatan) khususnya untuk penyakit katastrofik<sup>(7)</sup>. Penyebab lain dari defisit pembiayaan JKN-KIS berdasarkan hasil penelitian Retnaningsih<sup>(8)</sup> dan Djamhari et al.,<sup>(9)</sup> adalah:

1. Beban layanan kesehatan yang tinggi melebihi sumber pendapatan (iuran).
2. Kurangnya transparansi atas pengelolaan keuangan kebijakan kesehatan .
3. Belum maksimalnya cakupan kepesertaan baik dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), maupun Peserta Penerima Upah (PPU), serta kurangnya kepatuhan peserta dalam membayar iuran khususnya pada kategori PBPU.
4. Beban pendanaan kesehatan untuk penyakit katastrofik yang terus meningkat.
5. Fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) belum maksimal.

(4). Maulandy Rizki Bayu Kencana. Bertahun-tahun Defisit, Keuangan BPJS Kesehatan Akhirnya Surplus Rp 38,7 Triliun - Bisnis Liputan6.com [Internet]. 2022 [cited 2022 Aug 31]. Available from: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5005877/bertahun-tahun-defisit-keuangan-bpjs-kesehatan-akhirnya-surplus-rp-387-triliun>

(5). Maulandy Rizki Bayu Kencana. Sistem Kelas Dihapus, Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024 - Bisnis Liputan6.com [Internet]. 2022 [cited 2022 Aug 31]. Available from: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5006130/sistem-kelas-dihapus-iuran-bpjs-kesehatan-tak-naik-hingga-2024>

(6). Agustinus Ranga Respati. Tak Lagi Defisit, Ini 3 Faktor yang Membuat BPJS Kesehatan Surplus [Internet]. 2022 [cited 2022 Aug 31]. Available from: <https://money.kompas.com/read/2022/06/10/143400326/tak-lagi-defisit-ini-3-faktor-yang-membuat-bpjs-kesehatan-surplus>

(7). Putri N. Analisis Penyebab Defisit Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; 2021.

(8). Retnaningsih H. Defisit BPJS Kesehatan Dan Wacana Sharing Cost Peserta JKN-KIS Mandiri Berpenyakit Katastrofik. Info Singk Kesejaht Sos. 2017;9(22/II/Puslit).

(9). Djamhari EA, Aidha CN, Ramdhaningrum H, Kurniawan DW, Fanggalidaj SJ, Herawati H, et al. Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya? 2020;

FKTP masih berfokus pada layanan kuratif, bukan pelayanan preventif dan promotive untuk pencegahan penyakit.

Berdasarkan penyebab masalah defisit pembiayaan JKN-KIS tersebut, dampak lain dapat muncul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan misalnya:

1. Jika BPJS Kesehatan membuat kebijakan pengurangan pembiayaan layanan kesehatan pada penyakit katastropik dengan tujuan penghematan, maka dapat mengakibatkan turunnya kualitas layanan kesehatan.
2. Jika BPJS Kesehatan membuat kebijakan pemberian denda apabila peserta melakukan keterlambatan pembayaran iuran, masyarakat justru menjadi enggan untuk membayar iuran dan denda yang dianggap dapat membebani pengeluaran rumah tangga.

## USULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana JKN-KIS yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kesehatan.

2. Penghapusan biaya denda keterlambatan pembayaran iuran bagi peserta JKN-KIS kelas III.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsep gotong-royong dalam pembiayaan kesehatan berbasis JKN-KIS.
4. Peningkatan dan pengawasan sistem rujukan dan rujuk balik yang lebih baik dengan pemanfaatan sistem informasi sebagai upaya kendali mutu dan kendali biaya.
5. Peningkatan fungsi FKTP sebagai ujung tombak layanan kesehatan dengan upaya dan pemberian layanan promotive dan preventif khususnya pencegahan penyakit katastropik yang kegiatannya dibiayai oleh BPJS Kesehatan.
6. Kemudahan pembayaran iuran JKN-KIS dengan fitur auto-debet untuk meningkatkan ketepatan waktu pembayaran iuran.
7. Pemanfaatan teknologi dompet digital dan promo khusus untuk pembayaran iuran JKN. Dompet digital dapat memudahkan masyarakat untuk membayar dan meningkatkan ketepatan waktu membayar iuran.